

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2018-2023**



**KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Pakong. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pakong. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Pakong dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Pakong.

Pakong, Juni 2022

CAMAT PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

Pembina TK I/IV -B

NIP. 19680103 199503 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i-ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iiiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Landasan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.-7
1.3 Maksud dan Tujuan	8-10
1.4 Sistematika Penulisan	10-12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	15-16
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	16
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kecamatan..	Error! Bookmark not defined.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakong	24
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	31

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga.....	31
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi.....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	32
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS).....	33
3.5 Penentuan isu-isu strategis	34
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
BAB VIII PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	25
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan	18
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Pamekasan	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pakong	27
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakong terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan	31
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	31
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	32
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakong ditinjau dari implikasi RTRW	33
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakong ditinjau dari implikasi KLHS	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pakong	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan	46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan	41
Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pakong Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Pakong menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Pakong juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakong. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Pakong berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Pakong terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan RPJMD, Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan



Sumber : Analisa UU 25 Tahun 2004

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 17) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 18) Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21) Instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
- 34) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.
- 35) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum;

- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

Susunan Organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pakong Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

(1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesatuan Bangsa;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (3). Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarisnya.
 - (4). Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;

- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Seksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Sekretariat, membawahi:

1).Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian

Tugasnya :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Kecamatan;

- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
- j. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2). Sub Bagian Keuangan dan Aset;

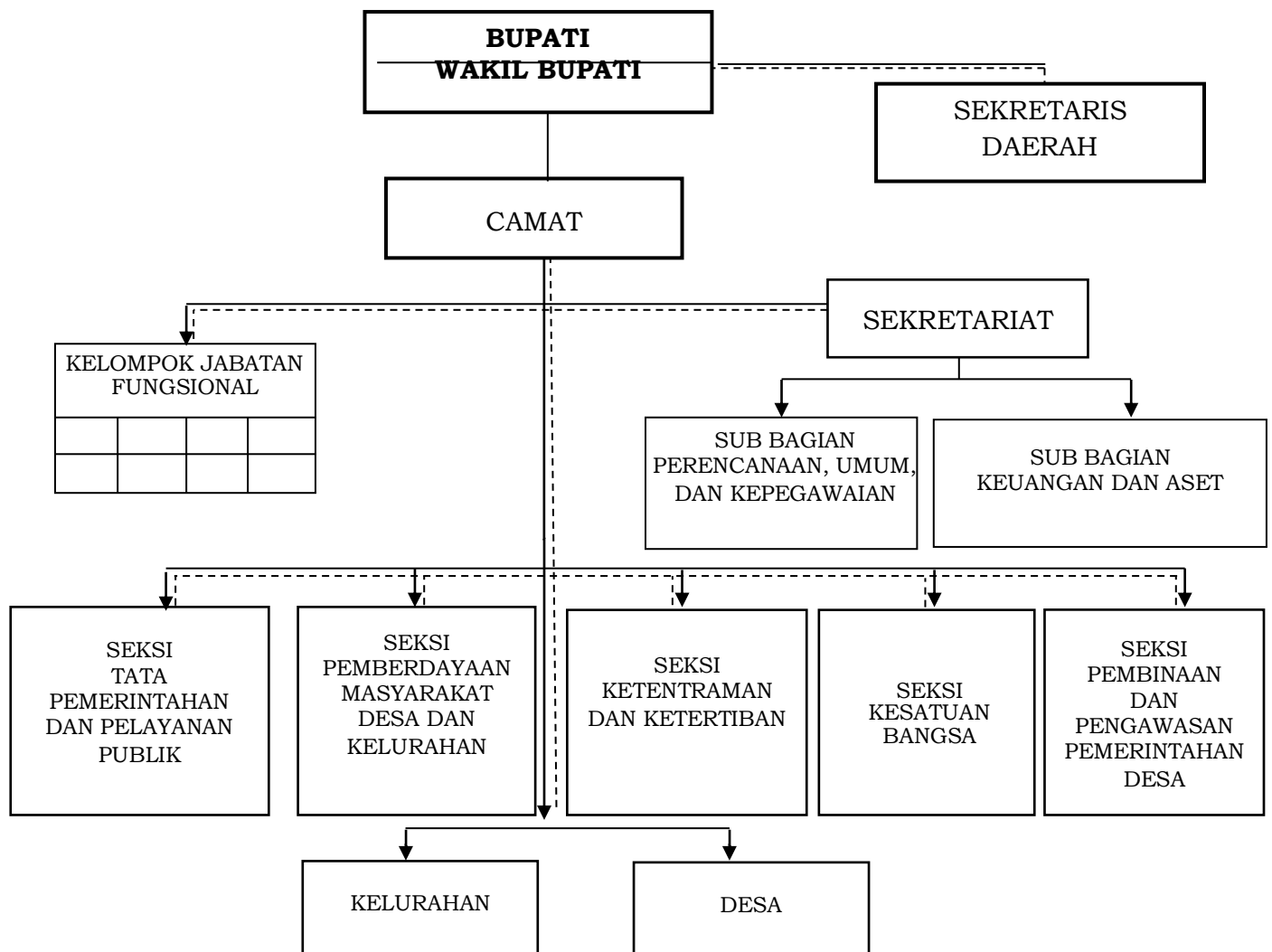
Tugasnya :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kecamatan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pakong Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATANKABUPATEN PAMEKASAN



1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum serta layanan informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
- f. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Merancang alur pelayanan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- j. Memproses pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan perumusan program dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengordinasian penanggulangan bencana;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan kerja sama dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat;
- h. Melaporkan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

- pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- e. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - f. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
 - g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
- c. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan desa;
- e. Penyiapan Pelaksanaan pendampingan dana desa;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;

- g. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Pakong

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pakong harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pakong.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakong

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Pakong sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebanyak 15 Orang, yang terdiri dari:

- 1. Eslon II : -
- 2. Eslon III : 2 Orang
- 3. Eslon IV : 6 Orang
- 4. Pejabat fungsional : -

5. Staf/Non Eselon : 7 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebanyak 15 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 :- Orang
2. Sarjana S-1 :7 Orang
3. Diploma -3 : -
4. SLTA :8 Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pakong

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Asset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	202.500.000		0	0	
2	Gedung Kantor	2	199.400.000		0	0	
3	Gedung Serbaguna	1	159.120.000		0	0	
4	Pendopo	1	98.500.000		0	0	
5	Rumah Dinas	1	129.700.000		0	0	

6	Musholla	1	29.750.000		0	0	
7	Mobil	2	221,500,000		0	0	
8	Sepeda Motor	7	111,294,500		0	0	
9	AC	1	3,000,000		0	0	
10	Komputer Dell	4	36,800,000		0	0	
11	Laptop	4	42,000,000		0	0	
12	Printer Epson L3110	4	13,800,000		0	0	
	Printer Epson L360	1	3,200,000		0	0	
13	TV	2	13,900,000		0	0	
14	Sound System	1	5,000,000		0	0	
15	Microfon	2	500,000		0	0	
16	Antena Parabola	1	29,000,000		0	0	
17	Pompa Air	2	50,000,000		0	0	
18	Kursi Rapat	58	26,100,000		0	0	
19	Kursi Plastik	50	2,500,000		0	0	
20	Kursi Putar	1	1,950,000		0	0	
21	Kursi Tunggu	1	2.200,000		0	0	
22	Kursi Tamu Kayu	2	2,750,000		0	0	
23	Meja	18	1,500,000		0	0	
24	Meja Rapat	3	13,050,000		0	0	
25	Meja Pelayanan	1	8,500,000		0	0	
26	Almari Besi BS 104	4	12,600,000		0	0	
27	Almari Besi B 204	4	13,800,000		0	0	
28	Almari Kayu	4	3,500,000		0	0	
29	Spring Bed	2	8,493,000		0	0	

30	Kulkas	1	2,200,000		0	0	
31	Brandkas	1	-		0	0	
32	Kompore Gas	1	800,000		0	0	
33	Tabung Gas	1	500,000		0	0	
34	Mesin Potong Rumput	2	9,500,000		0	0	
35	Power Supply	4	3,100,000		0	0	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakong

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Pakong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	3,51	3,76	NA	NA	NA	3,33	3,36	NA	NA	NA	89%	89%
2.	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	N/A	N/A	N/A	A	A	78 A	80 A	83 A	NA	NA	71,54 BB	72,39 BB	76,38 BB	NA	NA	92%	87%	92%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	85	90	100	80	85	81,548	109,05	109,82	80,47	82	128%	115%	109%	101%	96%

Narasi:.....

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kami masih mengacu kepada Renstra yang lama yaitu tahun 2013-2018 dimana indikator sasaran yang digunakan sangat berbeda dengan Renstra 2018-2023. Dilihat dari table di atas pada tahun 2016 s.d 2018 bahwa realisasi dari setiap indikator mengalami kenaikan dari target yang ditentukan dengan rasio capaian rata-rata 1 dari setiap indikator.

Pada tahun 2019 s.d 2020 kami mengacu pada Renstra terbaru 2018-2023 dimana indikator yang digunakan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Indeks pelayanan publik pada tahun 2020 di targetkan sebesar 3,76 dengan realisasi kinerja sebesar 3,36 dan capaian kinerja sebesar 89% atau katagori Baik target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Pada Indikator Nilai Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan kategori peringkat BB (Memuaskan) dengan nilai sebesar 78,38 dan capaian kinerja sebesar 92 % atau kategori Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Pada Tahun 2020 Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 82 dengan angka Indeks sebesar 96% maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik.

Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah Kecamatan, Sementara pada tahun 2019 target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 101%.

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	37.220.000	76.746.016	61.850.000	60.250.000	99.790.000	29.772.250	76.711.900	61.847.950	60.222.610	93.319.706	80%	100%	100%	100%	94%	37%	48%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.000.000	287.750.000	188.972.000			108.307.800	287.062.500	168.980.400			93%	100%	89%	-	-	3%	-34%
Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur				233.550.000	222.210.000				218.186.400	213.254.850	-	-	-	93%	96%	-1%	-25%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.500.000	1.650.000	10.000.000	-	-	7.500.000	1.648.000	10.000.000			100%	100%	100%			82%	102%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	12.362.000	29.000.000	-	-	10.000.000	12.362.000	29.000.000			100%	100%	100%			15%	9%

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	-	-	39,000,000	24.900.000	-	-	-	25.367.000	18.130.000	-	-	-	65%	73%	-9%	-25%
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Umum	10.000.000	-	174.000.000	261.600.000	124.524.000	10.000.000	-	172.744.500	224.880.000	124.108.000	100%	-	99%	86%	90%	-26%	-36%
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	136.530.500	101.675.109				121.880.500	101.615.000				89%	100%				-31%	-29%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan Renstra lama (2013-2018) mengampu 6 Program dan pada tahun 2019 s.d 2020 berdasarkan Renstra baru (2018-2023) mengampu 6 Program yang berbeda. Dari Program tersebut ada yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dilihat dari Tingkat Rasio Anggaran dan Realisasi dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi program keberhasilan sebagai berikut:

- a. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta penggalan dan pengelolaan sumber potensi Desa Mengadakan Penyuluhan dan Intensifikasi PBB ke desa-desa guna pelunasan PBB yang tepat waktu;

- b. Adanya koordinasi dan fasilitasi bersama dengan instansi sektoral dan para muspika serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mensosialisasikan dan mengevaluasi program pemerintah khususnya di Kecamatan Pakong sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- c. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan di SKPD Kabupaten Pamekasan melalui dukungan dari pimpinan informal atau tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk ikut aktif memotivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;

Pada Tahun 2020 ada beberapa Program yang belum maksimal penyerapan Anggaran dan Realisasinya, ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran covid-19, Sedangkan untuk solusi terkait program yang mengalami kegagalan atau tidak berhasil adalah bahwa Program tersebut akan di anggarkan pada tahun selanjutnya.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakong

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Pakong dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Pakong dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1). Kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- 2). Kebutuhan masyarakat atas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
- 3). Peraturan Bupati Pamekasan No. 33 Tahun 2017

b. Kelemahan

- 1). Kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan
- 2). Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kecamatan;
- 3). Pola pengalokasian anggaran belum sepenuhnya melaksanakan *azaz money follow programme*.
- 4). Peraturan Bupati Pamekasan No. 33 Tahun 2018 belum memuat pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil cukup sampai di Kecamatan.

2. Faktor Eksternal

b. Peluang

- 1). Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan pengajuan usulan tambahan jumlah ASN di Kecamatan Pakong;
- 2). Pembinaan tata kelola pemerintahan kelurahan/desa;
- 3). Koordinasi dengan OPD yang menangani komunikasi dan informatika dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
- 4). Revitalisasi manajemen data dan informasi kecamatan;
- 5). Mengintensifkan koordinasi dengan OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah.
- 6). Penerapan IT dalam pelayanan Publik dan Pelaporan yang terkoneksi dan terpadu antara kelurahan, desa dan kecamatan, sehingga memangkas alur birokrasi.

b. Tantangan

- Belum optimalnya kebijakan pemerintah daerah terkait peningkatan kinerja aparatur.
- Tarik ulur kewenangan kecamatan terkait dengan pelayanan publik
- Kebijakan pemerintah daerah yang tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat.

- Lemahnya koordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah kecamatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentangtentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kepala Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Umum Pemerintahan. Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pelayanan Masyarakat *). Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, serta Koordinasi bidang Kesatuan Bangsa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakong. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pakong

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa/kelurahan yang belum memadai
			Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa/kelurahan
			Kurang optimalnya pengawasan oleh APIP
2.	Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan	Prosedur pelayanan administrasi kecamatan belum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik	Kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan belum memadai
			Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang kurang memadai
3.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa
			Pengetahuan masyarakat terkait

		dan Kecamatan	partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih rendah
			Anggapan masyarakat bahwa usulannya tidak akan dipenuhi oleh pemerintah desa dan daerah
			Komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Pamekasan mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pamekasan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yaitu:

“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- ***Pamekasan Sejahtera dari bawah***, Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan.
- ***Pembangunan yang Merata***, Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
- ***Pembangunan Berkelanjutan***, Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Pakong sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
- ***Berdasarkan Nilai-nilai Agama***, Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yang terdiri dari

- Misi 1 : Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
- Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 3 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel. Oleh karena itu, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakong terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	➤ Profesionalisme sumber daya aparatur ➤ Kelembagaan pemerintah yang tepat ➤ Aturan (sistem) yang jelas ➤ Pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment ➤ Lingkungan pemerintahan yang sehat	➤ Sumber daya aparatur yang kurang kompeten ➤ Lemahnya sistem pengawasan anggaran ➤ Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat

NIHIL

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	NIHIL		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Pakong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pakong yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakong ditinjau dari implikasi RT-RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Perencanaan dan pengendalian penataan kawasan sesuai RTRW	Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan potensi wilayah	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakong ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Regulasi tentang KLHS	Belum optimalnya pengendalian terhadap kajian lingkungan hidup strategis

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).

3. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.
5. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.

Kelima Isu Strategi di atas telah mengakomodasi isu Strategi Internasional, Nasional dan Regional Jawa Timur. Isu Strategi tersebut kemudian diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang selanjutnya dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya.

Tugas dan fungsi Kecamatan Pamekasan merupakan batasan dalam menetapkan isu strategi Kecamatan Pamekasan. Berdasarkan uraian tugas dan fungsi sebagaimana telah disajikan pada Bab II, isu strategi daerah yang dapat didukung pelaksanaan kebijakannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
2. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka mendukung penyelesaian isu strategi tersebut, terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan
2. Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat desa/kelurahan.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah desa/kelurahan.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Pamekasan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta dekat dengan masyarakat;;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategi tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Pamekasan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan perangkat daerah, telaahan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, telaahan implikasi RTRW dan KLHS tersebut di atas dapat disimpulkan isu-isu strategi yang akan ditangani Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Musrenbang desa dan kecamatan);
- 4) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan;
- 5) Pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan ;
- 6) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- 7) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa di wilayah kerja kecamatan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

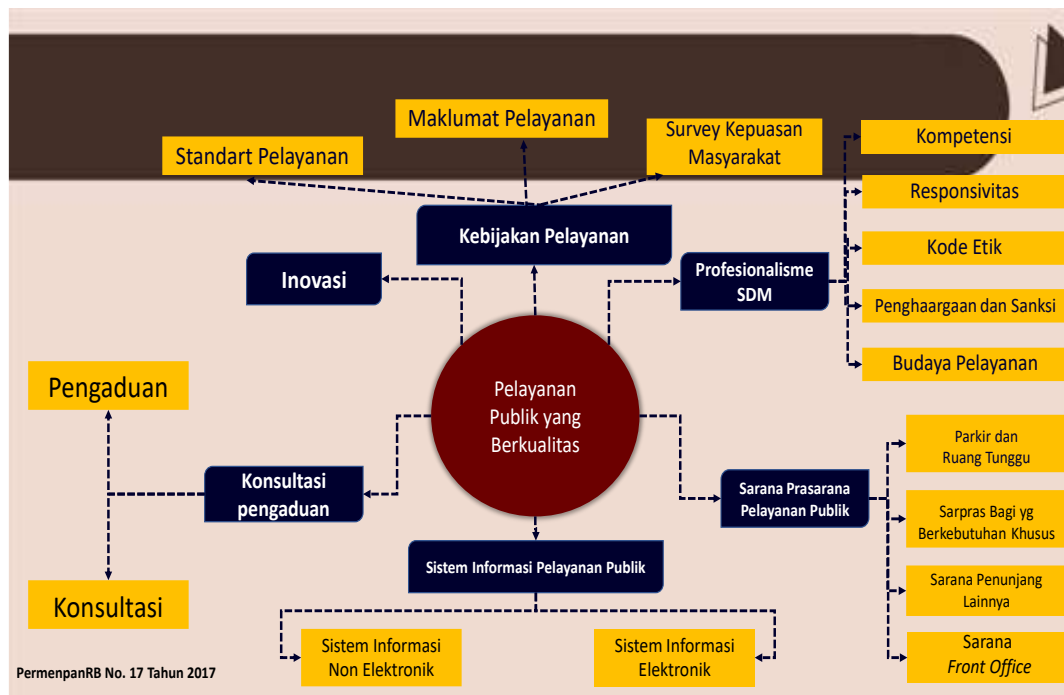
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Pamekasanyaitu “ ***Pamekasan sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai – Nilai Agama*** “, dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Pakong termasuk dalam Misi ke-3 yakni **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pakong danditurunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

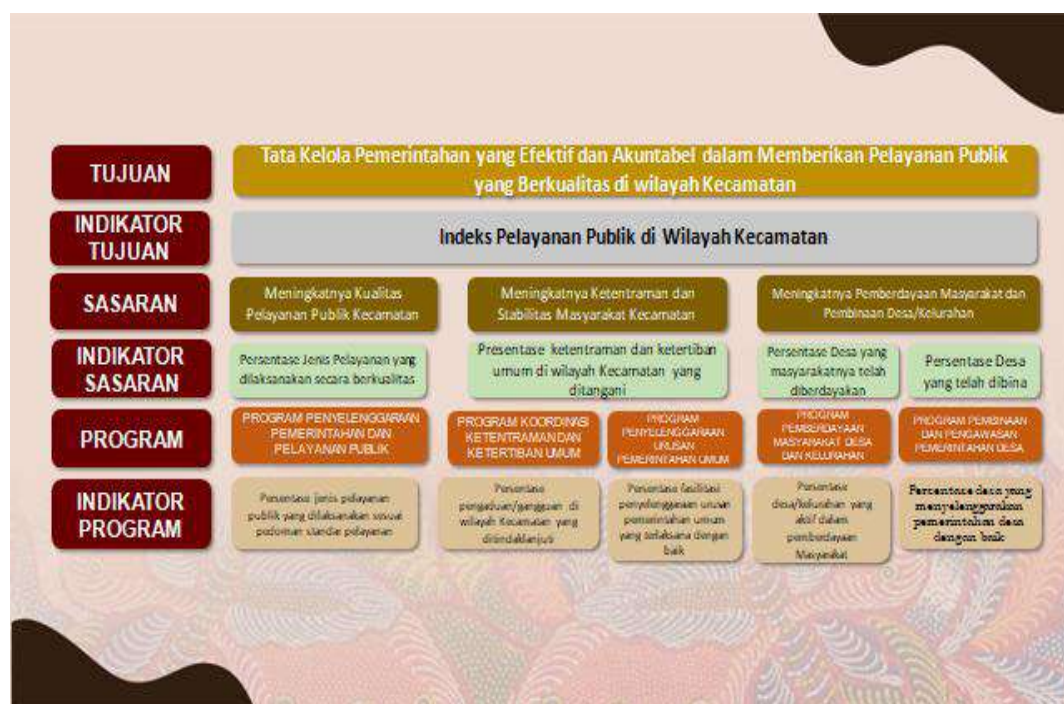
Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pakong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sebelum Perubahan											
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	NA	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4,51	
			Nilai Evaluasi Sakip	NA	A	A	A	A	A	A	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	3,75	3,80	3,90	4,00	4,00	
Setelah Perubahan											
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)		NA	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4,51	
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	NA	A	A	A	A	A	A	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	90	95	100	100	
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Peresentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	NA	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	NA	NA	NA	88 %	94 %	100 %	100 %	
			Prosentase Desa yang telah dibina	NA	NA	NA	80 %	90 %	100 %	100 %	



Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan



Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pakong selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memecahkan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Kecamatan Pakong memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pamekasan Sejahtera melalui Pembangunan dari bawah, merata dan berkelanjutan berdasarkan Nilai-nilai Islam			
MISI 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	1. Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kecamatan;	➤ Optimalisasi SOP Pelayanan Publik; ➤ Pemanfaatan TIK; ➤ Koordinasi Lintas Sektor; ➤ Koordinasi dan pembinaan
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	➤ Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan; ➤ Monitoring dan evaluasi musrenbang desa.
	3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3. Penguatan tata kelola fungsi administrasi kecamatan;	➤ Optimalisasi pelaksanaan SOP
	4. Meningkatnya		

	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	4. Penguatan kinerja sumber daya aparatur kecamatan;	➤ Fasilitas pendidikan dan pelatihan aparatur kecamatan ➤ Penilaian kinerja aparatur kecamatan
		5. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;	➤ Fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian;
		6. Peningkatan pemenuhan sarana Dan prasarana penunjang aratur	➤ Pengadaan dan perawatan rutin berkala sarana dan prasarana aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Kecamatan Pakong tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sebelum Perubahan																							
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efesien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	3	8	13				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	95%	80 %	360,500,000	83 %	392,000,000	85 %	360,000,000	87%	360,000,000	90%	365,000,000	90%	365,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
								Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A (80)	360,500,000	A (83)	392,000,000	A (85)	360,000,000	AA (87)	360,000,000	AA (90)	365,000,000	AA (90)	365,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	90%	90 %	72,000,000	90 %	72,000,000	90 %	78,000,000	90%	78,000,000	90%	78,000,000	100 %	78,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	01	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat ke luar daerah	90%	10 Orang/12 Bulan	10,000,000	10 Orang/12 Bulan	10,000,000	10 Orang/12 Bulan	10,000,000	10 Orang/12 Bulan	10,000,000	10 Orang/12 Bulan	10,000,000	10 Orang/12 Bulan	10,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	01	02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	95%	6 ltem	62,000,000	6 ltem	62,000,000	6 ltem	68,000,000	6 ltem	68,000,000	6 ltem	68,000,000	6 ltem	68,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	02		Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas	• Prosentase Sarana dan	95%	95 %	233,500,	95 %	265,000,	95 %	227,000,000	95%	227,000,000	95%	232,000,00	100 %	232,000,000	Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan

						Kinerja Aparatur	Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi			000		000					0				an Pakong	tan Pakong
							• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	95%														
		3	8	13	02	01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Dalam Kondisi Baik	95%	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	15,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	02	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	95%	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,000,000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,000,000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,000,000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,000,000	6 Item/2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,000,000	20,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	02	04	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	95%	5 Jenis	5,000,000	5 Jenis	10,000,000	5 Jenis	15,000,000	5 Jenis	15,000,000	5 Jenis	20,000,000	20,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	02	05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan	95%	8 Unit	28,500,000	8 Unit	35,000,000	8 Unit	30,000,000	8 Unit	30,000,000	8 Unit	30,000,000	30,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	02	07	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeler Yang Diadakan	95%	100 Buah	40,000,000	50 Buah	20,000,000	50 Buah	20,000,000	50 Buah	20,000,000	50 Buah	20,000,000	20,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	02	08	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan	95%	1 Unit	20,000,000	3 Unit	60,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	20,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	02	14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi baik	95%	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,000,000	7,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong

		3	8	1 3	02	1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas Gedung Kantor yang direhabilitasi	95%	1 Un it	50,000,0 00	1 Uni t	50,000,0 00	1 Uni t	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
		3	8	1 3	02	1 7	Pavingisasi Halaman Kantor	Jumlah Paving yang diadakan	0%	7x 5 m	75.000.0 00	0	75.000.0 00	7x5 m	0	0	0	0	0	7x5 m	75.000.000	Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
		3	8	1 3	02	2 2	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	95%	14 Or an g/1 2 Bul an	50,000,0 00	14 Ora ng/ 12 Bul an	50,000,0 00	14 Ora ng/ 12 Bul an	50,000,000	14 Ora ng/1 2 Bula n	50,000,000	14 Oran g/12 Bula n	50,000,000	14 Ora ng/ 12 Bula n	50,000,000	Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
		3	8	1 3	03		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	95%	95 %	55,000,0 00	95 %	55,000,0 00	95 %	55,000,000	95%	55,000,000	95%	55,000,000	95%	55,000,000	Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
		3	8	1 3	03	0 1	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kegiatan Kinerja Yang Dihasilkan	95%	6 Do ku me n	30,000,0 00	6 Do ku me n	30,000,0 00	6 Dok um en	30,000,000	6 Dok ume n	30,000,000	6 Doku men	30,000,000	6 Dok ume n	30,000,000	Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
		3	8	1 3	03	0 2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Dengan Kualitas Baik	95%	6 Do ku me n	25,000,0 00	6 Do ku me n	25,000,0 00		25,000,000	6 Dok ume n	25,000,000	6 Doku men	25,000,000	6 Dok ume n	25,000,000	Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Kecamatan							Indeks kepuasan pelayanan kecamatan Pakong	95%	80 %	367,000, 000	85 %	357,000, 000	90 %	347,000,000	95%	347,000,000	100 %	367,000,00 0	100 %	367,000,000	Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
		3	8	1 3	08		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	95%													Kantor Kecamat an Pakong	Kantor Kecama tan Pakong
								Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	95%	95 %	292,000, 000	95 %	282,000, 000	95 %	272,000,000	95%	272,000,000	95%	292,000,00 0	100 %	292,000,000		
								persentase sengketa masyarakat yang tertangani	95%														

	3	8	13	08	01	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Musrenbang Yang Terlaksana	95%	13 Kali	20,000,000	13 Kali	20,000,000	13 Kali	20,000,000	13 Kali	20,000,000	13 Kali	20,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	02	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	95%	24 Kali	30,000,000	24 Kali	30,000,000	24 Kali	30,000,000	24 Kali	30,000,000	24 Kali	30,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	03	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan Dan PKK yang difasilitasi	95%	38 Kali	18,000,000	38 Kali	18,000,000	38 Kali	18,000,000	38 Kali	18,000,000	38 Kali	18,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	04	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Peningkatan dan Profesionalisme	95%	12 Kali	15,000,000	12 Kali	15,000,000	12 Kali	15,000,000	12 Kali	15,000,000	12 Kali	15,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	05	Fasilitas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga yang terfasilitasi	95%	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	2 Kali	15,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	08	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaan Dan Hari Besar Nasional Yang Dikoordinasikan	95%	2 Item	30,000,000	2 Item	40,000,000	2 Item	30,000,000	2 Item	30,000,000	2 Item	30,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	10	Monitoring pengendalian keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu	Jumlah Pemilu Yang Dimonitoring	95%	2 Item	10,000,000	2 Item	-	2 Item	-	2 Item	10,000,000	2 Item	10,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08		Pelaksanaan Istighasah/Pengajian Kepala Daerah Bersama Masyarakat	Jumlah Istighasah/Pengajian yang Terlaksana	95%	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	47	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah Desa Yang Terfasialitasi	95%	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	46	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu Yang dibina	95%	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
	3	8	13	08	50	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pilkades Yang Dimonotoring	95%	8 Kali	10,000,000	8 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	8 Kali	10,000,000	8 Kali	10,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
	3	8	13	08	51	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi/ Silaturahmi Pimpinan Daerah bersama	Jumlah Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama	95%	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		

						Ulama/Tokoh dan Masyarakat	dan Masyarakat yang di laksanakan															
	3	8	13	08	60	Penanganan Sengketa Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dengan baik	95%	6 pengaduan	10,000,000	6 pengaduan	10,000,000	6 pengaduan	10,000,000	6 pengaduan	10,000,000	6 pengaduan	10,000,000	6 pengaduan	10,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
	3	8	13	08	61	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi	95%	2 Lokasi	10,000,000	2 Lokasi	10,000,000	2 Lokasi	10,000,000	2 Lokasi	10,000,000	2 Lokasi	10,000,000	2 Lokasi	10,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
	3	8	13	09		Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	• Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	95%	95%	75,000,000	95%	75,000,000	95%	75,000,000	95%	75,000,000	95%	75,000,000	100%	75,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
	3	8	13	08	01	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu Yang Dikembangkan	90%	2 Aplikasi	50,000,000	2 Aplikasi	50,000,000	2 Aplikasi	50,000,000	2 Aplikasi	50,000,000	2 Aplikasi	50,000,000	2 Aplikasi	50,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
	3	8	13	08	02	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah Survey Yang Dilaksanakan	95%	2 Kali	25,000,000	2 Kali	25,000,000	2 Kali	25,000,000	2 Kali	25,000,000	2 Kali	25,000,000	2 Kali	25,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong

Setelah Perubahan (2021-2022)																						
Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan							Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	NA					3,80	1.440.365.174	4,00	2.083.137.352	4,02	2.161.294.285	4,02	2.161.294.285		
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah						Nilai Evaluasi SAKIP	NA					85 (A)	1.362.095.174	87 (AA)	1.845.634.102	90 (AA)	1.886.294.285	90 (AA)	1.886.294.285		
		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	NA				85%	50.669.500	90%	141.354.050	100%	180.508.571	100%	180.508.571	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
							Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	NA					100%	1.283.503.174	100%	1.634.280.052	100%	1.660.785.714	100%	1.660.785.714	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
							Persentase peningkatan kompetensi aparatur	NA					80%	21.826.000	90%	10.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
							Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	NA					85%	6.096.500	90%	60.000.000	95%	20.000.000	95%	20.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</i>	NA					6 Dok ume n 4 Eval uasi	6.096.500	6 Dok ume n 4 Eval uasi	60.000.000	6 Doku men 4 Eval uasi	20.000.000	6 Dok ume n 4 Eval uasi	20.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	NA					2 Dok ume n	5.370.000	3 doku men	50.000.000	4 doku men	10.000.000	4 doku men	10.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD yang dilaksanakan	NA					31 Dok ume n RKA	726.500	34 doku men RKA	0	36 doku men RKA	0	36 doku men RKA	0	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	NA					0	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</i>	NA					1 Unit Kerj a OP D	1.209.003.17 4	1 Unit Kerj a OPD	1.559.780.25 2	1 Unit Kerja OPD	1.586.285.71 4	1 Unit Kerj a OPD	1.586.285.71 4	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaam gaji dan tunjangan	NA					14 bula n	1.201.503.17 4	14 bula n	1.539.780.25 2	14 bulan	1.566.285.71 4	14 bula n	1.566.285.71 4	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 2	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA					12 Bula n	7.500.000	12 Bula n	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bula n	20.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi</i>	NA					14 AS N	21.826.000	14 ASN	10.000.000	14 ASN	25.000.000	14 ASN	25.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas	NA					14 peg awai	21.826.000	16 pega wai	10.000.000	116 pega wai	25.000.000	16 pega wai	25.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong

								dan fungsi															
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	NA					80 sarana	11.000.000	85 sarana	21.629.750	90 sarana	21.000.000	90 sarana	21.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	NA					15 Buah	6.000.000	15 Buah	6.500.000	15 Buah	6.000.000	15 Buah	6.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	NA					1000 barang	5.000.000	1000 barang	5.129.750	1000 barang	5.000.000	1000 barang	5.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	NA					12 Kali Rapat Koordinasi	-	12 Kali Rapat Koordinasi	10.000.000	12 Kali Rapat Koordinasi	10.000.000	12 Kali Rapat Koordinasi	10.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA					59 Unit	0	59 Unit	30.358.300	59 Unit	60.000.000	59 Unit	60.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	NA					1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	NA					2 Kendaraan Dinas	0	2 Kendaraan Dinas	0	2 Kendaraan Dinas	50.000.000	2 Kendaraan Dinas	50.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2,0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang	NA					5 Buah	0	5		5		5 Buah		Kecamatan	Kecamatan

					7			diadakan							h		Buah	4.911.000	Buah	5.000.000	h	5.000.000	Pakong	Pakong
		7	1	1	2,0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	NA						3 Unit	0	4 Unit	25.447.300	3 Unit	5.000.000	3 Unit	5.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	NA						18 Jas a	74.500.000	18 Jasa	74.499.800	18 Jasa	74.500.000	18 Jasa	74.500.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 8	2	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	NA						12 kali	8.500.000	12 kali	8.499.800	12 kali	8.500.000	12 kali	8.500.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 8	4	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	NA						6 Jas a Lay ana n	66.000.000	6 Jasa Laya nan	66.000.000	6 Jasa Laya nan	66.000.000	6 Jasa Laya nan	66.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	NA						11 Bar ang	39.669.500	11 Bara ng	89.366.000	11 Bara ng	99.508.571	11 Bara ng	99.508.571	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	NA						2 Jas a Pem elih araa n	25.000.000	2 Jasa Pem eliha raan	25.000.000	25 Jasa Peme lihara an	25.000.000	25 Jasa Pem eliha raan	25.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	NA						5 Jeni s	-	5 Jenis	5.014.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jeni s	5.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	1	2,0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA						1 ged ung kant	10.669.700	1 gedu ng kant	54.352.000	1 gedu ng kanto	64.508.571	1 gedu ng kant	64.508.571	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong

								yang direhabilitasi						or		or		r		or			
		7	1	1	2,0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	NA					1 Unit	3.999.800	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan							<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	NA					90	4.500.000	95	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
	Meningkatn ya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan							<i>Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang dilayani</i>	NA					85 %	50.000.000	90%	118.763.25 0	100%	110.000.00 0	100 %	110.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan							<i>Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan</i>	NA					85 %	12.000.000	95%	38.740.000	100%	35.000.000	100 %	35.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
								<i>Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina</i>	NA					100 %	11.770.000	100 %	35.000.000	100%	80.000.000	100 %	80.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan</i>	NA					90%	4.500.000	95%	45.000.000	100%	50.000.000	100 %	50.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	2	2,0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>persentase Kegiatan Pemerintahan dyang sesuai dengan perenagkat daerah dan instansi vertikal</i>	NA					85%	4.500.000	95%	15.000.000	100%	15.000.000	100 %	15.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong

[illegible]

							Camat	pemerintahan yang dterfasilitasi														
		7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	NA				12 Desa	0	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	NA				90%	12.000.000	95%	38.740.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa	NA				100%	12.000.000	100%	38.740.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	NA				85 Orang	0	100 Orang	10.000.000	120 Orang	10.000.000	120 Orang	10.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efeektifitasnya	NA				13 Kali	12.000.000	13 Kali	13.740.000	13 Kali	15.000.000	13 Kali	15.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2,01	2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecfamatan	Jumlah Koordinasi pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah dan pihak swasta di kecamatan	NA				12 Kali	0	12 Kali	15.000.000	12 Kali	10.000.000	12 Kali	10.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	NA				85%	50.000.000	90%	93.763.250	100%	85.000.000	100%	85.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	4	2,0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	NA						95%	50.000.000	100 %	93.763.250	100%	85.000.000	100 %	85.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	4	2,0 3	1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenatara Nasional Indonesia dan Instansi Vertiksl di wilayah Kecamatan	jumlah Kegiatan Sinergitas atau Koordinasi yang dilaksanakan	NA						1 Kali	0	1 Kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	4	2,0 3	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	NA						6 Kegi atan	50.000.000	6 Kegi atan	88.763.250	6 Kegia tan	80.000.000	6 Kegi atan	80.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase kasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik</i>	NA						80%	0	90%	25.000.000	100%	25.000.000	100 %	25.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	5	2,0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan</i>	NA						80%	0	85%	25.000.000	90%	25.000.000	90%	25.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	5	2,0 1	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	NA						6 Pen gad uan	0	6 Peng adua n	5.000.000	6 Peng adua n	5.000.000	6 Pen gadua n	5.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	5	2,0 1	6	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tugas Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	NA						4 Kali	0	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong
		7	1	5	2,0 1		Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Ssosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	NA						1 Kali	0	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	Kecamat an Pakong	Kecama tan Pakong

		7	1	6			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mneyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik	NA					85%	11.770.000	90%	35.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa	NA					100%	11.770.000	100%	35.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	NA					13 kali	2.670.000	13 kali	15.000.000	13 kali	15.000.000	13 kali	15.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2,01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	NA					12 kali	0	12 kali	10.000.000	12 kali	10.000.000	12 kali	10.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	NA					4 Desa yang difasilitasi	9.100.000	0	0	8 Desa dan 2 pemilu yang difasilitasi	35.000.000	8 Desa dan 2 pemilu yang difasilitasi	35.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2,01		Koordinasi Pemdampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	NA					12 Desa	0	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2,01	8	rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disusun	NA					4 Dok	0	0	0	10 Dok	10.000.000	10 Dok	10.000.000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

Setelah Perubahan (2023)

Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan								Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	3,80	1,440,365,174	4,00	2,103,137,352	4,02	2,748,646,031	4,02	2,748,646,031		
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah							Nilai Evaluasi SAKIP	NA	NA	NA	NA	NA	85 (A)	1,362,095,174	87 (AA)	1,865,634,102	90 (AA)	2,533,646,031	90 (AA)	2,533,646,031		
		7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	NA	NA	NA	NA	NA	85%	1,362,095,174	90%	1,865,634,102	95%	2,533,646,031	95%	2,533,646,031	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	NA	NA	NA	NA	NA	6 Dokumen 4 Evaluasi	6,096,500	6 Dokumen 4 Evaluasi	60,000,000	6 Dokumen 33 Laporan	80,000,000	6 Dokumen 33 Laporan	80,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	NA	NA	NA	NA	NA	6 Dokumen	5,370,000	6 dokumen	50,000,000	6 dokumen	60,000,000	6 dokumen	60,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	31 Dokumen RKA	726,500	34 dokumen RKA	0	36 dokumen RKA	0	36 dokumen RKA	0	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	10 Koordinasi				10 Koordinasi	-	10 Koordinasi	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	4 Kali	10,000,000	33 Laporan	20,000,000	33 Laporan	20,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								<i>Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik</i>	NA	NA	NA	NA	NA	100%	1,283,503,174	100%	1,634,280,052	100%	2,108,645,999	100%	2,108,645,999	#REF!	#REF!
		7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</i>	NA	NA	NA	NA	NA	1 Unit Kerja OPD	1,209,003,174	1 Unit Kerja OPD	1,559,780,252	1 Unit Kerja OPD	2,028,646,052	1 Unit Kerja OPD	2,028,646,052	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	NA	NA	NA	NA	NA	15 ASN	1,201,503,174	15 ASN	1,539,780,252	15 ASN	1,998,646,052	15 ASN	1,998,646,052	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.02	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	NA	NA	NA	NA	12 Administrasi	7,500,000	12 Administrasi	20,000,000	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								<i>Persentase peningkatan kompetensi aparatur</i>	NA	NA	NA	NA	NA	80%	21,826,000	90%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	#REF!	#REF!

		7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	14 ASN	21,826,000	14 ASN	30,000,000	15 ASN	50,000,000	15 ASN	50,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	NA	NA	NA	NA	NA	14 pegawai	21,826,000	16 pegawai	30,000,000	5 pegawai	50,000,000	5 pegawai	50,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	NA	NA	NA	NA	NA	85%	50,669,500	90%	141,354,050	100%	295,000,032	100%	295,000,032	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	NA	NA	NA	NA	NA	80 sarana	11,000,000	85 sarana	21,629,750	36 sarana	35,000,000	36 sarana	35,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	NA	NA	NA	NA	NA	15 Buah	6,000,000	15 Buah	6,500,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1000 barang	5,000,000	1000 barang	5,129,750	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	NA	NA	NA	NA	NA	12 Kali Rapat Koordinasi	-	12 Kali Rapat Koordinasi	10,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	15,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	59 Unit	0	59 Unit	30,358,300	6 Unit	109,999,917	6 Unit	109,999,917	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	2 Kendaraan Dinas	0	2 Kendaraan Dinas	0	3 Unit	74,999,939	3 Unit	74,999,939	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	NA	NA	NA	NA	NA	5 Buah	0	5 Buah	4,911,000	5 Buah	-	5 Buah	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	NA	NA	NA	NA	NA	3 Unit	0	4 Unit	25,447,300	3 Unit	34,999,978	3 Unit	34,999,978	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	18 Jasa	74,500,000	18 Jasa	74,499,800	24 Laporan	79,999,947	24 Laporan	79,999,947	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.08	2	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	12 kali	8,500,000	12 kali	8,499,800	12 Laporan	9,999,947	36 Jasa	9,999,947	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.08	4	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	6 Jasa Layanan	66,000,000	6 Jasa Layanan	66,000,000	12 Laporan	70,000,000	24Jasa	70,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	NA	NA	NA	NA	NA	11 Barang	39,669,500	11 Barang	89,366,000	9 Unit	150,000,115	9 Unit	150,000,115	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	2 Jasa Pemeliharaan	25,000,000	2 Jasa Pemeliharaan	25,000,000	2 Unit Unit Perijinan Kendaraan	29,999,968	2 Unit Unit Perijinan Kendaraan	29,999,968	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	NA	NA	NA	NA	NA	5 Jenis	-	5 Jenis	5,014,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	1 gedung kantor	10,669,700	1 gedung kantor	54,352,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	NA	NA	NA	NA	NA	1 Unit	3,999,800	1 Unit	5,000,000	1 Unit	10,000,147	1 Unit	10,000,147	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	NA	NA	90	78,270,000	95	237,503,250	100	215,000,000	100	215,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	NA	NA	NA	NA	NA	90%	4,500,000	95%	45,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase Kegiatan Pemerintahan dyang sesuai dengan perenagkat daerah dan instansi vertikal terkait	NA	NA	NA	NA	NA	85%	4,500,000	95%	15,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	12 Kali	4,500,000	12 Kali	5,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.01	2	peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	NA	NA	NA	NA	NA	12 Kali	0	12 Kali	10,000,000	12 Kali	-	12 Kali	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	<i>persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan</i>	NA	NA	NA	NA	NA	80%	0	95%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.02	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal diwilayah Kecamatan</i>	NA	NA	NA	NA	NA	2 Kali	0	2 Kali	5,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	Kecamatan Pakong	
		7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan Efektifitasnya	NA	NA	NA	NA	NA	44 Kali	0	44 Kali	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang dterfasilitasi</i>	NA	NA	NA	NA	NA	90%	0	95%	10,000,000	100%	-	100%	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	NA	NA	NA	NA	NA	12 Desa	0	12 Desa	10,000,000	12 Desa	-	12 Desa	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan							<i>Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan</i>	NA	NA	NA	NA	NA	85%	12,000,000	95%	38,740,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat</i>	NA	NA	NA	NA	NA	90%	12,000,000	95%	38,740,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa</i>	NA	NA	NA	NA	NA	100%	12,000,000	100%	38,740,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	NA	NA	NA	NA	NA	85 Orang	0	100 Orang	10,000,000	5 Kelompok	10,000,000	5 Kelompok	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	NA	NA	NA	NA	NA	13 Kali	12,000,000	13 Kali	13,740,000	12 Kegiatan	15,000,000	12 Kegiatan	15,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah dan pihak swasta di kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	12 Kali	0	12 Kali	15,000,000	12 Kali	-	12 Kali	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan							Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang dilayani	NA	NA	NA	NA	NA	85%	50,000,000	90%	118,763,250	100%	125,000,000	100%	125,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	NA	NA	NA	NA	NA	85%	50,000,000	90%	93,763,250	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	95%	50,000,000	100%	93,763,250	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertiksl di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas atau Koordinasi yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	1 Kali	0	1 Kali	5,000,000	1 Kali	-	1 Kali	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	NA	NA	NA	NA	NA	6 Kegiatan	50,000,000	6 Kegiatan	88,763,250	6 Kegiatan	100,000,000	6 Kegiatan	100,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik	NA	NA	NA	NA	NA	80%	0	90%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	NA	NA	NA	NA	NA	80%	0	85%	25,000,000	90%	25,000,000	90%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	6 Pengaduan	0	6 Pengaduan	5,000,000	6 Pengaduan	-	6 Pengaduan	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	5	2.01	6	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tugas Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	4 Kali	0	4 Kali	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	5	2.01		Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	NA	NA	NA	NA	NA	1 Kali	0	1 Kali	10,000,000	24 Orang	15,000,000	24 Orang	15,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan							Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	NA	NA	NA	NA	NA	100%	11,770,000	100%	35,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mneyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik	NA	NA	NA	NA	NA	85%	11,770,000	90%	35,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa	NA	NA	NA	NA	NA	100%	11,770,000	100%	35,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	NA	NA	NA	NA	NA	13 kali	2,670,000	13 kali	15,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	12 kali	0	12 kali	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	4 Desa yang difasilitasi	9,100,000	0	0	8 Desa dan 2 pemilu yang difasilitasi	-	8 Desa dan 2 pemilu yang difasilitasi	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2.01	7	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	NA	NA	NA	NA	NA	12 Desa	0	12 Desa	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disusun	NA	NA	NA	NA	NA	4 Dok	0	4 Dok	0	10 Dok	-	10 Dok	-	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan PakongKabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan PakongKabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan PakongKabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pakong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Sebelum Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/a	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4,51
2	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	N/a	A	A	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/a	N/a	3,75	3,80	3,90	4,00	4,00
Setelah Perubahan								
1.	Nilai Evaluasi Sakip	NA	A	A	A	A	A	A
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	90	95	100	100

3.	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	NA	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	NA	NA	NA	88 %	94 %	100 %	100 %
5.	Persentase Desa yang telah dibina	NA	NA	NA	80 %	90%	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

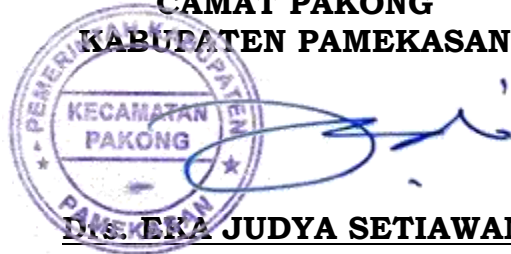
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Pakong ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Pakong sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pamekasan.

Pakong, Juni 2022

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN" at the top and "KECAMATAN PAKONG" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, there is a signature in blue ink.

Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

Pembina TK I/IV - B

NIP. 19680103 199503 1 003